

**RANCANGAN PROGRAM SEKOLAH INKLUSI
DI SEKOLAH DASAR NEGERI 159 SEKEJATI KOTA BANDUNG**

Aneka Ahmadi¹, Muhammad Hanifah², Nenden Ineu Herawati³

¹Magister PGSD UPI di Kampus Cibiru, ²Magister PGSD UPI di Kampus Cibiru,

³Universitas Pendidikan Indonesia di Kampus Cibiru,

¹anekaahmadi@upi.edu, ²muhammadhanifah4d@gmail.com,

³nendenineu@upi.edu

ABSTRACT

Inclusive schools are a form of equity and a form of embodiment of education without discrimination where children with special needs and children in general can receive the same education. Inclusive education is a form of special education service that requires all children with special needs to receive the same education at regular seats as their peers. So far, children with different abilities (disabilities) are provided with special educational facilities that are tailored to the degree and type of their disability, called Special Schools (SLB). Unknowingly, the SLB education system has built a wall of exclusivity for children with special needs. The implementation of inclusive schools for children with special needs should create an environment that is fun, friendly and can foster the confidence of students with special needs to get proper education in accordance with their rights. The reality of the implementation of incubation schools in Indonesia is still not in accordance with the concepts put forward and implementation guidelines, both in terms of students, teacher qualifications, facilities and infrastructure, parental and community support. The implementation of inclusive schools in Indonesia is still a phenomenon.

Keywords: Inclusion, program, design.

ABSTRAK

Sekolah inklusi merupakan bentuk pemerataan dan wujud perwujudan pendidikan tanpa diskriminasi dimana anak berkebutuhan khusus dan anak pada umumnya dapat memperoleh pendidikan yang sama. Pendidikan inklusif adalah salah satu bentuk layanan pendidikan khusus yang mensyaratkan semua anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang sama di bangku reguler dengan teman sebayanya. Selama ini anak yang memiliki kemampuan berbeda (disabilitas) diberikan fasilitas pendidikan khusus yang disesuaikan dengan derajat dan jenis kecacatannya, yang disebut Sekolah Luar Biasa (SLB). Tanpa disadari, sistem pendidikan SLB telah membangun tembok eksklusivitas bagi anak berkebutuhan khusus. Penyelenggaraan sekolah inklusi bagi anak berkebutuhan khusus seharusnya menciptakan lingkungan yang menyenangkan, ramah dan dapat menumbuhkan rasa percaya diri siswa dengan berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan haknya. Realitas pelaksanaan sekolah inkubasi di Indonesia masih belum sesuai dengan konsep yang dikemukakan dan pedoman pelaksanaan, baik dari sisi siswa, kualifikasi guru, sarana dan prasarana, dukungan orang tua dan masyarakat. Penyelenggaraan sekolah inklusi di Indonesia masih menjadi fenomena.

Kata Kunci: Inklusi, program, rancangan,

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara Indonesia, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat 1, bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Peran pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan yang merata tentunya sangat berpengaruh dan penting dalam pembangunan pendidikan. Selama ini anak berkebutuhan khusus telah diberikan fasilitas pendidikan khusus sesuai dengan jenjang dan jenis kekhususannya yang disebut Sekolah Luar Biasa (SLB). Namun Sekolah Luar Biasa (SLB) masih menjadi tembok yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dengan anak pada umumnya, hal ini menghambat proses interaksi diantara mereka. Akibatnya, anak berkebutuhan khusus menjadi kelompok yang dikucilkan dari interaksi sosial di masyarakat. Masyarakat tidak mengenal anak berkebutuhan khusus, begitu pula sebaliknya, anak berkebutuhan khusus merasa bukan bagian dari kehidupan masyarakat sekitar. Sekolah inklusif adalah bentuk

pemerataan dan wujud perwujudan pendidikan tanpa diskriminasi dimana anak berkebutuhan khusus dan anak pada umumnya dapat mendapatkan pendidikan yang sama. Dalam pendidikan inklusi, anak berkebutuhan khusus tidak mendapat perlakuan khusus atau keistimewaan khusus, tetapi memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan peserta didik lainnya. Kolaborasi berbagai pihak antara lain pemerintah, sekolah dan masyarakat sangat berpengaruh dalam pelaksanaannya, karena sekolah inklusi merupakan tantangan baru bagi sekolah dan masyarakat. Dengan terselenggaranya sekolah inklusi ini diharapkan mampu menciptakan generasi penerus yang dapat memahami dan menerima segala bentuk perbedaan serta tidak menimbulkan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat di masa yang akan datang.

Pendidikan inklusif telah disepakati oleh banyak negara untuk dilaksanakan dalam rangka memerangi perlakuan diskriminatif di bidang pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan inklusi didasarkan pada dokumen internasional yaitu Universal Declaration of Human Rights tahun 1948, United Nations Convention on

the Rights of the Child tahun 1989, World Declaration on Education for All, Jomtien tahun 1990, Standard Regulations on Equal Peluang bagi Penyandang Disabilitas tahun 1993, Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education 1994. Menurut beberapa ahli, pendidikan inklusi memiliki berbagai pengertian, antara lain:

1. Tarmansyah (2009:75) mengatakan bahwa sekolah inklusi adalah sekolah yang menampung semua siswa dalam satu kelas.
2. Tarmansyah (2009:76) berpendapat bahwa pendidikan inklusi adalah penempatan anak secara penuh penyandang disabilitas ringan, sedang, dan berat di kelas reguler.
3. L.K.M. Marentek (2007:145) berpendapat bahwa pendidikan inklusi adalah layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus di sekolah reguler (SD, SMP, SMA, dan SMK) yang tergolong luar biasa baik dalam arti disabilitas, lamban belajar (anak lamban belajar) serta mereka yang memiliki kesulitan belajar lainnya.

Saat ini Indonesia belum memiliki data yang akurat dan spesifik mengenai jumlah anak berkebutuhan khusus. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jumlah anak berkebutuhan khusus yang terdata sekitar 1,5 juta. Namun secara umum, PBB memperkirakan sedikitnya 10 persen anak usia sekolah memiliki kebutuhan khusus. Di Indonesia, jumlah anak usia sekolah yaitu 5-14 tahun sebanyak 42,8 juta. Jika mengikuti perkiraan tersebut, diperkirakan ada kurang lebih 4,2 juta anak Indonesia yang berkebutuhan khusus. Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Indonesia cukup besar. Pendidikan merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia untuk menjamin kelangsungan hidupnya agar lebih bermartabat. Oleh karena itu negara berkewajiban memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 31 (1). Namun sayangnya sistem pendidikan di Indonesia belum mengakomodir keberagaman sehingga menyebabkan munculnya segmentasi lembaga pendidikan berdasarkan

perbedaan agama, suku, bahkan perbedaan kemampuan fisik dan mental siswa. Jelas bahwa segmentasi lembaga pendidikan ini telah menghambat siswa untuk dapat belajar menghargai realitas keragaman dalam masyarakat. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya untuk mengimplementasikan pendidikan inklusif melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan dinas pendidikan di provinsi, kota/kabupaten. Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan pendidikan inklusi menemui berbagai hambatan dan tantangan. Hambatan yang sering dilaporkan adalah kesalahpahaman tentang konsep pendidikan inklusif, regulasi atau kebijakan yang tidak konsisten, sistem pendidikan yang tidak fleksibel dan sebagainya.

Pendidikan inklusi adalah suatu kebijakan pemerintah dalam mengupayakan pendidikan yang dapat dinikmati oleh setiap warga negara guna memperoleh pemerataan pendidikan tanpa memandang anak berkebutuhan khusus dan anak pada umumnya agar dapat bersekolah dan memperoleh

pendidikan yang layak dan bermutu untuk masa depannya hidup. Strategi, metode, atau cara penyelenggaraan pendidikan inklusif di setiap negara sangat bervariasi (UNESCO, 200; Stubbs, 2002). Keberagaman pelaksanaan ini disebabkan karena masing-masing negara memiliki budaya dan tradisi yang berbeda. Selain itu, perbedaan implementasi juga terjadi di tingkat provinsi, kota, bahkan sekolah. Upaya pengenalan dan implementasi pendidikan inklusi di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1980-an.

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain faktor budaya, politik, dan sumber daya manusia (Kwon, 2005). Penyelenggaraan pendidikan inklusi dapat dievaluasi dengan suatu indeks yang disebut indeks inklusi (Ainscow, 2000). Indeks inklusi ini dibangun dari tiga dimensi, yaitu (1) dimensi budaya (menciptakan budaya inklusif), (2) dimensi Kebijakan (menghasilkan kebijakan inklusif), dan (3) dimensi praktik (mengembangkan praktik inklusif). Masing-masing dimensi dibagi menjadi dua bagian, yaitu: Dimensi budaya terdiri dari bagian membangun masyarakat (building

community) dan bagian membangun nilai inklusi (membentuk nilai-nilai inklusif). Dimensi kebijakan terdiri dari bagian pengembangan tempat untuk semua (developing setting for all dan bagian implementasi dukungan untuk keragaman (organizing support for diversity). Sedangkan dimensi praktis terdiri dari bagian belajar dan bermain bersama (orchestrating play and learning) dan bagian pengeralahan sumber daya (memobilisasi sumber daya) Pasal 11 ayat 1 dan 2 tentang hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah adalah sebagai berikut: "Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi" "Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin ketersediaan dana untuk menyelenggarakan pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun."Undang-undang di atas mengisyaratkan bahwa semua anak usia sekolah wajib memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu, serta pendidikan untuk semua (education for all). Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari bagaimana proses pendidikan di

dalamnya yang kemudian tertuang dalam kebijakan-kebijakan pemerintah yang diambil dalam penyelenggaraan pendidikan. Salah satunya adalah anak berkebutuhan khusus yang harus mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.

Dalam perkembangannya, pendidikan anak berkebutuhan khusus telah banyak mengalami perubahan, yaitu pada awalnya pendidikan anak berkebutuhan khusus bersifat segregasi atau terpisah dari masyarakat pada umumnya. Dalam penyelenggaraan pendidikan seperti sekolah SLB yang di dalamnya terdapat peminatan untuk anak berkebutuhan khusus sesuai dengan hambataannya seperti: SLB-A untuk sekolah anak tunanetra, SLB-B untuk sekolah anak tunarungu, SLB-C untuk sekolah anak tunagrahita, SLB-D untuk sekolah anak lumpuh. Selanjutnya menuju pendidikan integratif atau dikenal dengan pendekatan terpadu yang mengintegrasikan anak luar biasa ke dalam sekolah reguler, namun masih terbatas pada anak yang mampu mengikuti kurikulum di sekolah dan kemudian inklusi, yaitu konsep

pendidikan yang tidak membedakan antara keragaman karakteristik individu. Selama ini anak berkebutuhan khusus diberikan fasilitas pendidikan khusus yang disesuaikan dengan derajat dan jenis kebutuhannya yang disebut Sekolah Luar Biasa (SLB). Tanpa disadari, sistem pendidikan SLB telah membangun tembok eksklusivitas bagi anak berkebutuhan khusus. Hingga saat ini, tembok eksklusivisme tersebut tanpa disadari telah menghambat proses saling mengenal antara anak berkebutuhan khusus dengan anak pada umumnya. Akibatnya, dalam interaksi sosial di masyarakat, menjadi kelompok-kelompok yang berkebutuhan khusus masyarakat terasing dari dinamika sosial dalam masyarakat. Masyarakat menjadi tidak mengenal kehidupan kelompok berkebutuhan khusus. Sedangkan kelompok berkebutuhan khusus sendiri merasa keberadaannya tidak menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Seiring dengan berkembangnya tuntutan kelompok berkebutuhan khusus dalam menyuarkan haknya, muncullah konsep pendidikan inklusi. Salah satu perjanjian internasional

yang mendorong terwujudnya sistem pendidikan inklusif adalah Konvensi Hak Penyandang Disabilitas dan Protokol Opsional yang telah diratifikasi pada Maret 2007. Dalam pasal 24 Konvensi ini disebutkan bahwa setiap negara wajib menyelenggarakan pendidikan inklusif. sistem pendidikan pada setiap jenjang pendidikan. Salah satu tujuannya adalah mendorong partisipasi penuh kelompok berkebutuhan khusus dalam kehidupan bermasyarakat. Namun dalam praktiknya sistem pendidikan inklusi di Indonesia masih menyisakan persoalan tarik-menarik antara pemerintah dan praktisi pendidikan.

Meskipun sampai saat ini sekolah inklusi masih terus melakukan pembenahan dalam berbagai aspek, namun dari sisi idealnya, sekolah inklusi merupakan sekolah ideal baik bagi anak berkebutuhan khusus maupun tidak. Lingkungan yang tercipta sangat mendukung anak berkebutuhan khusus, mereka dapat belajar dari interaksi spontan dengan teman sebayanya terutama dari aspek sosial dan emosional. Sedangkan anak yang tidak berkebutuhan khusus memberikan kesempatan kepada mereka untuk belajar berempati, suka

menolong dan memiliki kepedulian. Selain itu, ada bukti lain bahwa mereka yang tidak berkebutuhan khusus memiliki prestasi yang baik tanpa merasa terganggu sedikitpun.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan saat menulis artikel ini menggunakan deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan/penelitian kepustakaan dari artikel nasional, artikel internasional, karya referensi dan artikel dari Internet. Data ikumpulkan melalui resensi teks kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi.

Langkah-langkahnya menurut Zed (2014) yaitu 1) topik artikel yang menggugah pikiran; 2) mencari informasi untuk mendukung topik; 3) menentukan fokus topik yang akan dibahas; 4) menemukan bahan referensi yang diperlukan; 5) pengelompokan bacaan menurut subtopik; 6)Lihat dan salin materi Pendukung; 7) Pengelompokan kembali bahan dan periksa hasilnya; 8) Mulai menulis.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penyelenggaraan sistem sekolah inklusi merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk membangun masyarakat yang inklusif. Masyarakat yang saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebhinekaan sebagai realitas kehidupan. Banyak kasus yang muncul terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusi, seperti minimnya fasilitas pendukung sistem pendidikan inklusi, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh guru sekolah inklusi menandakan sistem pendidikan inklusi belum dipersiapkan dengan baik. Penyelenggaraan sekolah inklusi bagi anak berkebutuhan khusus harus menciptakan lingkungan yang ramah terhadap pembelajaran, yang memungkinkan semua siswa belajar dengan nyaman dan menyenangkan.

Menyelenggarakan sekolah inklusi tidak sesederhana menyelenggarakan sekolah negeri. Kenyataan di lapangan karakteristik anak berkebutuhan khusus yang diterima tidak sesuai dengan kebijakan, seperti dalam hal penerimaan jenis peminatan, tingkat kecerdasannya masih di bawah rata-rata, tidak ada batasan untuk jumlah

siswa yang diterima, dan tidak memiliki sarana prasarana khusus. Dukungan dari orang tua anak berkebutuhan khusus, orang tua siswa reguler, dan masyarakat baru berupa dukungan moril. Padahal dukungan yang dibutuhkan sebaiknya berupa dukungan material atau keterlibatan langsung dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Dukungan pemerintah baik pusat maupun daerah belum merata di semua daerah dan masih sangat terbatas, baik dalam hal bantuan teknis (keterlibatan dalam pelaksanaan: pemantauan, Model sekolah inklusi yang dapat diterapkan di Indonesia adalah sebagai berikut (Ashman, 1994 dalam Emawati, 2008):

1. Kelas Reguler (Full Inklusi)

Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal sepanjang hari di kelas reguler dengan kurikulum yang sama.

2. Kelas Reguler Berkelompok

(*cluster*)

Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal di kelas reguler dalam kelompok khusus.

3. Kelas Reguler Tarik Keluar (*pull out*)

Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal di kelas reguler, namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruangan lain untuk belajar dengan guru pembimbing khusus.

4. Kelas Reguler berkelompok (*cluster*) dan Tarik keluar (*Pull Out*)

Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal di kelas reguler dalam kelompok khusus, dan pada waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke kelas lain untuk belajar dengan guru pembimbing khusus.

5. Kelas Kustom dengan Berbagai Integrasi

Anak berkebutuhan khusus belajar di kelas khusus di sekolah reguler, namun dalam bidang tertentu mereka bisa belajar bersama anak normal di kelas reguler.

6. Kelas khusus penuh

Anak berkebutuhan khusus belajar di kelas khusus di sekolah reguler

**Rancangan program inklusi di SDN
159 Sekejati Kota Bandung**

Visi

Mewujudkan sistem Pendidikan Inklusif untuk membangun kehidupan

masyarakat yang inklusif dan pendidikan untuk semua.

Misi

Ada empat misi utama yang akan dijalankan dalam program pengembangan pendidikan inklusif, yaitu:

1. Pembudayaan pendidikan Inklusif di SDN 159 Sekejati Kota Bandung
2. Menyelenggarakan sistem pelayanan pendidikan yang inklusif
3. Menyediakan sistem data dan informasi untuk mendukung pendidikan inklusif.
4. Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stake holders

Tujuan

Ada dua tujuan utama yang ingin dicapai melalui pendidikan inklusif, yaitu:

1. Semua anak berkebutuhan khusus dapat memenuhi haknya untuk memperoleh pendidikan secara bermutu.
2. Terselenggara sistem pendidikan inklusif yang bermutu di SDN 159 Sekejati Kota Bandung

Sasaran

Sasaran adalah tujuan yang lebih operasional dan terukur yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Sasaran merupakan target-target yang spesifik dan detail yang

harus dicapai supaya dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif dibagi ke dalam 8 katagori, yaitu (1) kebijakan dan regulasi, (2) kelembagaan, (3) sumber daya manusia, (4) data dan sistem informasi, (5) sarana dan pendanaan, (6) kurikulum dan pembelajaran (7) sistem dukungan, (8) publikasi dan sosialisasi.

Table 3.1.
Sasaran pengembangan pendidikan inklusif di SDN 159 Sekejati Kota Bandung

Dimensi	Sasaran
Kebijakan dan regulasi	1. Tersedia dokumen permendiknas nomor 70/2009 tentang pendidikan inklusif
	2. Tersedia pedoman/penduan pelaksanaan pendidikan inklusif
	3. Terselenggara sosialisasi tentang pendidikan inklusif kepada orang tua siswa, anggota komite sekolah,

	pengawas sekolah, pejabat dinas pendidikan, anggota dewan pendidikan, tokoh masyarakat, dan masyarakat secara luas.	Sumber daya manusia	1. Semua kepala sekolah di sekolah inklusif telah memperoleh sosialisasi/pelatihan tentang pendidikan inklusif
Publikasi dan sosialisasi	1. Tersedia spanduk/banner di kantor pemerintahan, sekolah atau area publik tentang pendidikan inklusif.		2. Semua tenaga kependidikan di sekolah inklusif telah memperoleh sosialisasi tentang pendidikan inklusif
	2. Terselenggara seminar tentang pendidikan inklusif.		3. Tersedia kurikulum modifikasi bagi anak berkebutuhan khusus
	3. Semua sekolah menyelenggarakan pendidikan inklusif.		4. Tersedia materi dan strategi pembelajaran yang bervariasi untuk mengakomodir kebutuhan anak berkebutuhan khusus
	4. Tersedia model sekolah inklusif		
Kelembagaan	1. Terbentuk forum pendidikan inklusif		
	2. Terlaksana pendataan anak berkebutuhan khusus di sekolah		
Data dan sistem informasi	1. Semua guru di sekolah inklusif telah mengikuti pelatihan tentang pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.		

Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah upaya untuk menganalisis kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity) dan tantangan (treght). Kekuatan pada hahikatnya adalah sisi positif yang ada dalam internal organisasi. Kelemahan adalah sisi negative yang ada di dalam

internal organisasi. Peluang adalah sisi positif yang ada di lingkungan eksternal organisasi, sedangkan tantangan adalah sisi negatif yang ada di lingkungan eksternal organisasi.

Analisis Kondisi Internal

Sifat	Fakta (kondisi)
Positif (kekuatan)	1. Sebagian guru sudah memperoleh sosialisasi/workshop/pelatihan tentang pendidikan inklusif. 2. Kepala sekolah sudah memperoleh sosialisasi/pelatihan/workshop tentang pendidikan inklusif 3. SDN 159 Sekejati Kota Bandung sudah menerima dan memberi layanan pendidikan kepada anak inklusif. 4. Sebagian masyarakat sudah memiliki pemahaman dan sikap yang positif terhadap pendidikan inklusif. 5. Sebagian unsur pejabat di dinas pendidikan sudah memiliki pemahaman dan sikap yang positif terhadap pendidikan inklusif.

Negative (kelemahan)	1. Belum semua guru memiliki pemahaman dan sikap yang positif terhadap pendidikan inklusif. 2. Belum semua elemen masyarakat memiliki pemahaman dan sikap yang positif terhadap pendidikan inklusif. 3. Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif belum tersosialisasikan secara optimal kepala sekolah, pejabat dinas pendidikan dan elemen masyarakat lainnya. 4. Sekolah belum memiliki fasilitas pendukung terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif. 5. Belum tersedia pendanaan khusus untuk mendukung pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. 6. Belum teredia guru pendamping khusus (GPK) di sekolah inklusi 7. Belum tersedia perangkat kurikulum yang dimodifikasi untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi.
-----------------------------	---

	8. Belum tersedia pedoman (petunjuk teknis) pelaksanaan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. 9. Belum tersedia kerjasama sekolah inklusif dengan pusat sumber sebagai untuk mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif. 10. Belum tersedia SLB sebagai pusat sumber.
--	---

	berpotensi menjadi pusat sumber. 5. Ada perguruan tinggi di Kota Bandung yang memiliki jurusan pendidikan luar biasa.
Negative (Tantangan)	1. Masih banyak sekolah yang belum menyelenggarakan pendidikan Inklusi. 2. Masih banyak berbagai elemen masyarakat yang belum memiliki pemahaman dan sikap positif terhadap pendidikan inklusi.

Analisis Faktor Eksternal

Sifat	Fakta (kondisi)
Positif (Peluang)	1. Pemerintahan Kota Bandung memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif. 2. Telah tersedia landasan hukum pelaksanaan pendidikan di tingkat nasional berupa Permendiknas no. 70 tahun 2009. 3. Telah tersedia pedoman pelaksanaan pendidikan inklusif di Kota Bandung. 4. Tersedia banyak SLB yang

Arah Kebijakan

Hasil analisis SWOT serta sasaran yang ingin dicapai terkait dengan pendidikan inklusif, maka perlu ditetapkan arah kebijakan sekurang-kurangnya dalam empat tahun ke depan. Arah kebijakan dalam empat tahun ke depan terkait dengan pengembangan dan pelaksanaan pendidikan inklusif adalah sebagai berikut:

1. penguatan kebijakan dan regulasi tentang pendidikan inklusi.
2. peningkatan sosialisasi tentang pendidikan inklusif kepada berbagai elemen (*stake holders*).

3. penguatan kualitas SDM para penyelenggara pendidikan inklusi di tingkat satuan pendidikan.
4. peningkatan dukungan dana dan fasilitas bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi.
5. Pendataan dan pengembangan data based anak berkebutuhan khusus.
6. Peningkatan kerjasama dengan berbagai elemen untuk mempercepat dan memperkuat pelaksanaan pendidikan inklusi

Strategi

Ada beberapa strategi yang akan dilakukan dalam kurun empat tahun ke depan untuk membangun yang inklusi. Strategi yang dikembangkan terutama dimaksudkan untuk menutupi kekurangan/kelemahan yang ada dengan memanfaatkan berbagai kelebihan dan peluang yang dimiliki.

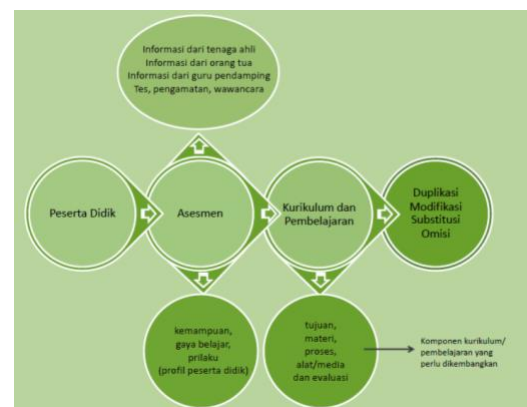
Nilai/Prinsip Kerja

Supaya program pengembangan Pendidikan Inklusif di SDN 159 Sekejati Kota Bandung dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka upaya yang dilakukan perlu dilandasi oleh etos dan cara kerja yang handal yang

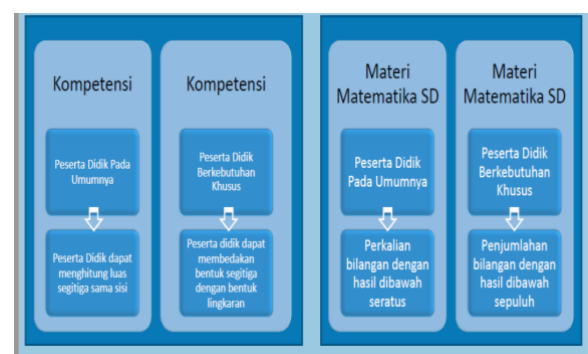
memungkinkan semua sasaran dapat dicapai secara maksimal.

Oleh karena itu perlu ada nilai-nilai dan atau prinsip yang harus dijadikan landasan kerja bagi semua pihak yang terkait terdiri dari : professional, Akuntabel, Kerjasama, Berkelanjutan, Kemanusiaan.

Rancangan kurikulum dan pembelajaran pendidikan inklusif



Gambar 1. Skema rancangan kurikulum



Gambar 2 Penerapan model kurikulum/pembelajaran

D. Kesimpulan

Penyelenggaraan pendidikan inklusi merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah yang diharapkan

mampu menghasilkan generasi penerus yang dapat memahami dan menerima segala bentuk perbedaan serta tidak menimbulkan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat di masa yang akan datang. Di beberapa kota di Indonesia telah bermunculan sekolah inklusi yang penyelenggaraannya bekerjasama dengan pihak sekolah dan pemerintah kota. Namun pada kenyataannya masih sulit untuk mewujudkan sekolah inklusi yang dapat memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Salah satu bentuk kesulitan tersebut adalah masih adanya masyarakat yang tidak menerima siswa berkebutuhan khusus di sekolah reguler, selain itu masih adanya ketidakharmonisan antara berbagai pihak dalam penyelenggaraan sekolah inklusi, seperti kebutuhan guru yang berkualitas dan sekolah yang baik untuk sepenuhnya mendukung penyelenggaraan sekolah inklusi. Masing-masing pihak ingin bersinergi mewujudkan pendidikan inklusif di Indonesia dalam upaya bersama mewujudkan cita-cita pendidikan tanpa diskriminasi. Pendidikan inklusi masih perlu mendapat perhatian khusus dalam penyelenggaraannya agar kelak anak berkebutuhan khusus

benar-benar mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kondisinya dan dapat menghargai realitas keragaman dalam kehidupan di masyarakat secara maksimal.

Dengan adanya program Sekolah Inklusif ini, harapan kami akan menjadi kenyataan. Pendidikan Inklusif merupakan suatu tujuan yang terpenting menghadapi banyak tantangan. Ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi dalam menyelenggarakan Sekolah Inklusif ini, antara lain yaitu:

1. Pendidikan Inklusif bukan label.
2. Pendidikan Inklusif adalah sebuah filosofi.
3. Pendidikan Inklusif adalah sebuah Visi.
4. Pendidikan Inklusif adalah sebuah konsep pendidikan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan bagi semua anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Herawati, N.I. (2021). *Pendidikan Inklusif*. Bandung: UPI Press

Artikel in Press :

Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus.
"Proses Pembelajaran Dalam Setting Inklusi Di Sekolah Dasar.
Vol. 1, No. 1, Januari 2012

Jurnal Pendidikan Khusus. Fenomena Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus. Vol. 7, No. 2, November 2010

Jurnal :

Alessio, S. D. '. (2013). Inclusive education in Italy: a reply to Giangreco, Doyle and Suter (2012). In *Life Span and Disability XVI* (Vol. 1).

Barton, L., & Armstrong, F. (n.d.). Policy, Experience and Change: Cross Cultural Reflections on Inclusive Education INCLUSIVE EDUCATION: CROSS CULTURAL PERSPECTIVES 4. www.springer.com/series/6123

D'Alessio, S. (2011). Inclusive education in Italy. A Critical Analysis of the Policy of Integrazione Scolastica. University of London: Sense Publishers

Ianes, D., Demo, H., & Dell'Anna, S. (2020). Inclusive education in Italy: Historical steps, positive developments, and challenges. *Prospects*, 49(3–4), 249–263. <https://doi.org/10.1007/s11125-020-09509-7>

Leli Erawati, I., Margareta Sinaga, R., Universitas Lampung, F., & Soemantri Brojonegoro No, J. (2016). PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA PADA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DALAM PENDIDIKAN INKLUSIF 1). In *Jurnal Studi Sosial* (Vol. 4, Issue 1).

Mooij, T. & Smeets, Ed. (2006). Design, Development and Implementation of Inclusive Education. *European Educational*

Research Journal, Volume 5, Number 2, 2006. DOI : 10.2304/eerj.2006.5.2.94

Mura, G., Alcaraz, A. O., Aleotti, F., Cobo, M. O., Rubio Gomez, M., & Diamantini, D. (2020). Inclusive Education in Spain and Italy: Evolution and Current Debate Kapsayıcı Eğitimin İspanya ve İtalya'daki Evrimi ve Güncel Tartışma. In *Journal of Inclusive Education in Research and Practice*.